

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abidin, Zambari, 1989, *Pengertian dan Asas Pidana Schema dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta
- Adriano, 2016, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidaan Terhadap Korporasi*, Mandar Maju, Bandung
- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amran, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arifin, Zainal, 2012, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Remaja Rorsdakarya, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Danusaputro, ST Munadjat, 1980, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hiarij, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Koesoemahatmadjaya, Ety Utju R, 2011, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung

- Mahmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mahmud, Syahrul, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Matalatta, Andi, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, 2018, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 Nomor 3, 2018, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljanto, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljanto, 1983, *Perbuatan, Pertanggungjawaban dan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Morris, Roseberg, 1968, *Metode-metode Riset Deskriptif (Terjemahan oleh Cahya Wiratna)*, Bentang, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Prawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sabuan, Ansorie, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafity Press, Jakarta
- Sjawie, Hasbullah, F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)*, Setara Press, Malang
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudrajat, M, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Jakarta
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Jakarta
- Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Jakarta
- Usfah, Fuad, Moh Najih, dan Tonggat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Wibisana, Andri G, 2016, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 2 Tahun 2016, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

C. Makalah, Artikel dan Internet

Herdiana, Aulia Fitri, *Indo Tambangnya Pastikan Aktivitas Anak Usahanya Tak Terganggu*, <https://industri.kontan.co.id/news/indo-tambangraya-pastikan-aktivitas-anak-usahanya-tak-terganggu>, diakses tanggal 14 Maret 2020

Walhi, *Putusan Jauh dari Asas Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding*, <https://www.walhi.or.id/putusan-jauh-dari-asas-keadilan-koalisi-desak-negara-lakukan-upaya-banding>, diakses tanggal 14 Maret 2020

Jatam, *Belum Puas Mencemari Selama Dua Puluh Tahun, Kini PT Indominco Mandiri Malah Ingin Memindahkan Sungai Santang*, <https://www.jatam.org/2015/09/15/belum-puas-mencemari-selama-dua-puluh-tahun-kini-pt-indominco-mandiri-malah-ingin-memindahkan-sungai-santang>, diakses tanggal 14 Maret 2020

Surono, Raniah Sirin Laliba, *Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana Dumping Limbah B3: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg*, <http://digilib.uinsby.ac.id/39012/>, diakses tanggal 14 Maret 2020.

Simanullang, Oswald, *Pemidanaan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Izin: Studi Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg*, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2597/Oswald%20Simanullang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> diakses tanggal 14 Maret 2020.

Buga, Valentinus Ramon, *Sinkronisasi Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Studi Kasus di PT Indominco Mandiri, Bontang)*, <https://docplayer.info/32427910-Artikel-tesis-disusun-oleh-valentinus-ramon-buga-npm-program-studi-magister-ilmu-hukum-konsentrasi-hukum-bisnis.html>> diakses tanggal 14 Maret 2020.

RUU KUHP, *Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana"; dan Pasal 47 berbunyi: "Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama"; lalu Pasal 48: "Selain ketentuan sebagaimana dalam Pasal 47, Tindak*

Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi". <https://setkab.go.id/rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-ruu-kuhp-20-september-2019-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/>, diakses tanggal 14 April 2020.

ICJR, *Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya*", <https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya>, diakses tanggal 1 Mei 2020.

